

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2019, *Dinamika Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Adler, Freda, Gerhard O.W. Mueller, dan William S. Laufer, 2018, *Criminology*, Ninth Edition, McGraw-Hill Education, New York.
- Algra, N.E., dan H.R.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, A. Teloekei, dan Boerhanoeddin St. Batoeah, Binacipta, Bandung.
- Alkostar, Artidjo, 2015, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ambardi, Kuskridho, 2009, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, diterjemahkan oleh Zaim Rofiqi, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Agustina, Shinta, Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, Ilhamdi Taufik, Zainul Daulay, Edita Elda, Zhauri Ismadhani, dan Nelsa Fadilla, 2015, *Obstruction of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta.
- Amundsen, Inge, 2006, *Political Corruption*, U4 Anti-Corruption Resource Centre Chr. Michelsen Institute, Bergen.
- _____, "Extractive and Power-Preserving Political Corruption", dalam Inge Amundsen (ed.), 2019, *Political Corruption in Africa: Extraction and Power Preservation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- Ancel, Marc, 2001, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, diterjemahkan oleh J. Wilson, Routledge Taylor & Francis Group, London.
- Anggraini, Titi, Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti, Syamsudin Haris, Saldi Isra, Topo Santoso, Lucky Djani, Sulistio, Lia Wulan, Erik Kurniawan, Veri Junaidi, dan Fadli Ramadhanil, 2014, *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah*, Perludem, Jakarta.

_____, “Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu”, dalam Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, dan Mada Sukmajati (eds.), 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Ketiga, Pustaka Magister, Semarang.

_____, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta.

_____, 2017, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta.

_____, 2019, *Hukum Pidana Lanjut*, Cetakan Kedelapan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2020, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Pustaka Magister, Semarang.

Aspinall, Edward, dan Mada Sukmajati, “Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia”, dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (eds.), 2015, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Research Centre for Politics and Government, Yogyakarta.

_____, dan Ward Berenschot, 2019, *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, diterjemahkan oleh Edisius Riyadi, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2020, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Depok.

_____, 2021, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Keempat, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Depok.

Asy'ari, Hasyim, 2019, *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2021, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Aspek Nasional & Aspek Internasional)*, Mandar Maju, Bandung.

al-Rasyid, Harun, 2017, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Badoh, Ibrahim Z. Fahmy, dan Abdullah Dahlan, 2010, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Baidowi, Achmad, 2018, *Di Balik Penyusunan UU Pemilu: Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi*, SUKA-Press, Yogyakarta.

Barkan, Steven E., 2023, *Criminology: A Sociological Understanding*, Eighth Edition, Pearson, Hoboken.

Beirne, Piers, dan James W. Messerschmidt, 2015, *Criminology: A Sociological Approach*, Sixth Edition, Oxford University Press, New York.

Bemmelen, J.M. van, 1987, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung.

Binding, Karl, 1872, *Die Normen und ihre Übertretung: Eine Untersuchung über die Rechtmäßige Handlung und die Arten des Delikts, Erster Band, Erste Abtheilung: Normen und Strafgesetze*, Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Bintoro, Sutarno, Johnson Ridwan Ginting, Fajri Nursyamsi, Farid Hanggawan, Giri Ahmad Taufik, Gita Putri Damayana, M. Nur Sholikin, Maryam Rodja,

Miko Susanto Ginting, Muhammad Faiz Aziz, Rachmad M. Firmansyah, dan Ronald Rofiandri, 2014, *Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara: Dasar Hukum, Pembentukan, Kewenangan, Anggaran, Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Kantor Perwakilan, Gedung, Kontak Informasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.

Birch, Sarah, "Electoral Corruption", dalam Todd Landman dan Neil Robinson (eds.), 2009, *The SAGE Handbook of Comparative Politics*, SAGE Publications, London.

_____, 2013, *Electoral Malpractice*, Reprinted, Oxford University Press, Oxford.

Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Croall, Hazel, 2001, *Understanding White Collar Crime*, Open University Press, Buckingham.

Danil, Elwi, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.

Disyacitta, Fikri, "Pemantauan Berbasis Organisasi Masyarakat Sipil terhadap Praktik Korupsi Pemilu 2019: Sebuah Pemetaan Konseptual", dalam Gregorius Sahdan (ed.), 2019, *Membongkar Mafia dan Oligarki dalam Pemilu 2019*, The Indonesian Power for Democracy, Sleman.

Djaja, Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju, Bandung.

Fadjar, A. Mukthie, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu secara Demokratis*, Setara Press, Malang.

Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Febari, Rizki, 2015, *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Fellmeth, Aaron X., dan Maurice Horwitz, 2021, *Guide to Latin in International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York.

Friedman, Lawrence M., 1987, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

_____, dan Grant M. Hayden, 2017, *American Law: An Introduction*, Third Edition, Oxford University Press, New York.

Gaffar, Janedjri M., 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Garner, Bryan A. (ed.), 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, St. Paul.

Gewin, B., 1907, *Beginselen van Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden.

Gibbons, Kenneth M., "Toward an Attitudinal Definition of Corruption", dalam Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston, dan Victor T. LeVine (eds.), 2019, *Political Corruption: A Handbook*, Second Edition, Routledge, New York.

_____, "Variations in Attitudes toward Corruption in Canada", dalam Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston, dan Victor T. LeVine (eds.), 2019, *Political Corruption: A Handbook*, Second Edition, Routledge, New York.

Goldstein, Joseph, "Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice", dalam George F. Cole (ed.), 1993, *Criminal Justice: Law and Politics*, Sixth Edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont.

Gunarto, Marcus Priyo, 2007, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Marginal Press, Yogyakarta.

_____, "Hukum yang Berkeadilan dan Menyejahterakan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Keberlangsungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam Dian Agung Wicaksono dan Muhammad Fatahillah Akbar (eds.), 2014, *Hukum yang Berkeadilan dan Menyejahterakan: Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman.

Hamzah, Andi, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2014, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2015, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Softmedia, Jakarta.

Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Kanisius, Sleman.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Harkrisnowo, Harkristuti, “Penelitian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana”, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (eds.), 2016, *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana: Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta.

Heidenheimer, Arnold J., Michael Johnston, dan Victor T. LeVine, “Terms, Concepts, and Definitions: An Introduction”, dalam Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston, dan Victor T. LeVine (eds.), 2019, *Political Corruption: A Handbook*, Second Edition, Routledge, New York.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

_____, “Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana”, dalam Achmad Dodi Haryadi (ed.), 2012, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

_____, dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

Hodess, Robin, “Introduction”, dalam Robin Hodess, Tania Inowlocki, Diana Rodriguez, dan Toby Wolfe (eds.), 2004, *Global Corruption Report 2004: Political Corruption*, Pluto Press, London.

- Hoefnagels, G. Peter, 1973, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, diterjemahkan oleh Jan G.M. Hulsman, Springer Science+Business Media, New York.
- Husein, Harun, 2019, *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Ichwanuddin, Wawan, Aisah Putri Budiatri, Atika Nur Kusumaningtyas, Dian Aulia, Dini Suryani, Khanisa, Nyimas Latifah Letty Azis, Pandu Yuhsina Adaba, Sarah Nuraini Siregar, dan Yusuf Maulana, 2020, *Pemilu Serentak 2019 dan Demokrasi di Indonesia: Survei Opini Publik Pasca-Pemilu 2019*, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2020, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Kanisius, Sleman.
- _____, 2020, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, Edisi Revisi, Kanisius, Sleman.
- _____. (ed.), 2021, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: "Gesetzgebungswissenschaft sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-undangan"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Indrayana, Denny, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Johnston, Michael, "The Definitions Debate: Old Conflicts in New Guises", dalam Arvin K. Jain (ed.), 2001, *The Political Economy of Corruption*, Routledge, London.
- Joseph, Oliver, dan Frank McLoughlin, 2019, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm.

- _____, dan Vasil Vashchanka, 2022, *Vote Buying: International IDEA Electoral Processes Primer 2*, International IDEA, Stockholm.
- Junaidi, Veri, Fadli Ramadhanil, dan Firmansyah Arifin, 2015, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Perludem, Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, 2020, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017, *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017, *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2014-2016*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2008, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kriekhoff, Valerine J.L., “Penelitian Hukum Normatif dalam Hukum Pidana: Metode dan Aplikasinya”, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (eds.), 2016, *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana: Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2018, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Loqman, Loebby, 1996, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi: Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.

Mahfud MD, Moh., 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2017, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2023, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta.

Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Belas, Kencana, Jakarta.

Mawardi, Irvan, dan Muhammad Jufri, 2019, *Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.

McLaughlin, Eugene, dan John Muncie (eds.), 2019, *The Sage Dictionary of Criminology*, Fourth Edition, SAGE Publications, London.

Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_____, 2014, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_____, 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2021, *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*, Rajawali Pers, Depok.

_____, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Buku Mojok, Sleman.

_____, dan Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Depok.

_____, dan Saldi Isra, 2018, *Parlemen Dua Kamar: Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Moeljatno, 1983, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2021, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Puluh Empat, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhtadi, Burhanuddin, 2024, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, Cetakan Kelima, diterjemahkan oleh Zaim Rofiqi dan Burhanuddin Muhtadi, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, dan Diah Sulistyani RS, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung.

_____, 2020, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Universitas Semarang Press, Semarang.

- Mulyadi, Dedi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta.
- _____, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2022, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma, dan Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2015, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- _____, 2021, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta.
- Nelson, Febby Mutiara, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Nirwanto, D. Andhi, 2015, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Nugroho, Kris, dan Ferry Daud M. Liando, “Nilai dan Asas Pemilu”, dalam Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, dan Mada Sukmajati (eds.), 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Orozco-Henríquez, Jesús, 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm.
- Pettalolo, Ratna Dewi, “Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dalam Ahsanul Minan (ed.), 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Pfeiffer, Silke, “Vote Buying and its Implications for Democracy: Evidence from Latin America”, dalam Robin Hodess, Tania Inowlocki, Diana Rodriguez, dan Toby Wolfe (eds.), 2004, *Global Corruption Report 2004: Political Corruption*, Pluto Press, London.
- Philp, Mark, “The Definition of Political Corruption”, dalam Paul M. Heywood (ed.), 2015, *Routledge Handbook of Political Corruption*, Routledge, New York.

- Poernomo, Bambang, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prent c.m., K., J. Adisubrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Semarang.
- Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Puadi, 2020, *Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang: Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*, Aldera Shalih Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022, *Pedoman Regulatory Impact Analysis dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang*, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Radbruch, Gustav, "Legal Philosophy", dalam John H. Wigmore, Jerome Hall, Edmond N. Cahn, Lon L. Fuller, George W. Goble, Edward A. Hogan, Jr., Josef L. Kunz, Edwin W. Patterson, Harold G. Reuschlein, dan Max Rheinstein (eds.), 1950, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge.
- Rahardjo, Satjipto, 2011, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Remmelink, J., 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian tentang Teori-Ajaran Dasar*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Maharsa Publishing, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 2005, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2019, *Analekta JES*, Kompas, Jakarta.

Samekto, FX. Adji, 2025, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, Rajawali Pers, Depok.

Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2007, *Hukum & Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

_____, "Tindak Pidana Pemilu", dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (eds.), 2016, *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana: Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta.

_____, "Beberapa Catatan tentang Vote Buying dan Candidacy Buying dalam Pemilu Indonesia", dalam Feri Amsari, Khairul Fahmi, dan Charles Simabura (eds.), 2019, *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

_____, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok.

_____, dan Choky Risdha Ramadhan, 2019, *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

_____, dan Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Cetakan Ketujuh Belas, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, dan Hariman Satria, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, Depok.

_____, dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Skolnick, Jerome H., 2011, *Justice without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*, Fourth Edition, Quid Pro Books, New Orleans.

Soehino, 2008, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

_____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat Belas, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, dan Pudji Santoso, 1988, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam Belas, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung.

_____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung.

_____, 2020, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sukmajati, Mada, dan Aditya Perdana, "Tata Kelola Pemilu di Indonesia", dalam Pramono U. Tanthowi, Aditya Perdana, dan Mada Sukmajati (eds.), 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan, 2024, *Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance)*, Kompas, Jakarta.

_____, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Seri Demokrasi Elektoral Buku 2*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

_____, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral Buku 15*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

_____, Abhan, Mochammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar, 2022, *Keadilan Pemilu*, Rajawali Pers, Depok.

Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Sutherland, Edwin H., Donald R. Cressey, dan David F. Luckenbill, 1992, *Principles of Criminology*, Eleventh Edition, General Hall, Lanham.
- Syam, Radian, 2022, *Masalah Hukum Pemilu: Konsep dan Analisis Kasus*, Rajawali Buana Pustaka, Depok.
- Termorshuizen, Marjanne, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta.
- Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan, 2006, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara Langsung*, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Tuccinardi, Domenico (ed.), 2014, *International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks*, International IDEA, Stockholm.
- Umar, Jaharudin, Roy Hamrain, Eka Putra Santoso, Yopin Polutu, dan Rahadian H. Wisnu Wardhana, “Praperadilan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019: Studi Kasus di Provinsi Gorontalo”, dalam Ahsanul Minan (ed.), 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2017, *State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation*, Second Edition, United Nations, Vienna.
- Wakanno, Thomas T., dan Astuti Usman, “Efektifitas Penegakan Pidana Pemilu di Wilayah Kepulauan: Studi Kasus di Kabupaten Maluku Barat Daya”, dalam Ahsanul Minan (ed.), 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta.
- Wangga, Maria Silvy E., 2012, *Hukum Pidana Pemilu*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

_____, 2017, *Pedoman dan Tata Cara Penulisan Disertasi*, Madani, Malang.

Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Andalas University Press, Padang.

Zimring, Franklin E., dan David T. Johnson, "On the Comparative Study of Corruption", dalam Henry N. Pontell dan Gilbert Geis (eds.), 2007, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Springer Science+Business Media, New York.

Zoelva, Hamdan, 2016, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani, 2013, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 *jis.* Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, dan Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29).

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 452).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 453).

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 40).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun

2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, 2 Desember 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 perihal *judicial review* Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 18 Februari 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal *judicial review* Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal *judicial review* Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal *judicial review* Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIV/2016 perihal *judicial review* Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 10 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal *judicial review* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 perihal *judicial review* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 10 Oktober 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 perihal *judicial review* Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 perihal *judicial review* Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 16 April 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVII/2019 perihal *judicial review* Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 488, Pasal 502, Pasal 516, Pasal 521, dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 28 November 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 perihal *judicial review* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 26 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal *judicial review* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 26 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 perihal *judicial review* Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4 Mei 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 perihal *judicial review* Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 24 November 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal *judicial review* Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 29 September 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 perihal *judicial review* Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 15 Juni 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 perihal *judicial review* Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 16 Oktober 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXII/2024 perihal *judicial review* Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 16 Oktober 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 perihal *judicial review* Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 26 Juni 2025.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 198/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby perihal kasus atas nama terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwibowo, 4 April 2019;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST. perihal kasus atas nama terdakwa Bowo Sidik Pangarso, 4 Desember 2019.

D. Jurnal, Makalah, dan Pidato

Adelina, Fransiska, “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, Maret, 2019.

Akbar, Muhammad Fatahillah, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September, 2019.

Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, dan Hendri Koeswara, “Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Mei, 2020.

Fahmi, Khairul, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni, 2015.

Gunarto, Marcus Priyo, “Faktor Historis, Sosiologis, Politis, dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP”, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 1, Februari, 2013.

Heide, Liesbeth van der, dan Jip Geenen, “Preventing Terrorism in the Courtroom—The Criminalisation of Preparatory Acts of Terrorism in the Netherlands”, *Security and Human Rights*, Volume 26, Issue 2-4, November, 2015.

Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 3, September, 2020.

Iskadrenda, Gaza Carumna, dan Edward Omar Sharif Hiariej, “Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 22, Nomor 4, Desember, 2022.

_____ , “Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passive Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Maret, 2024.

- Lembaga Survei Indonesia, “Survei Nasional tentang Pilkada dan Politik Uang di Masa Wabah COVID-19”, disampaikan pada *Rilis Survei: Pilkada dan Politik Uang di Masa Wabah COVID-19*, Jakarta, 10 Januari 2021.
- Manullang, E. Fernando M., “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember, 2022.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- _____, “Dilema Doktrinal dalam Proses Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi (Antara Doktrin *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*)”, disampaikan pada *Seminar Nasional Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, 10 April 2019.
- Omara, Andy, “The Functions of the 1945 Constitutional Preamble”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari, 2019.
- Santoso, Topo, 2014, *Peranan Hukum Pidana dalam Proses Demokrasi*, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 5 November 2014.
- _____, “Catatan atas Draft RUU Pemilu”, disampaikan pada *Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 30 Juni 2020.
- Satria, Hariman, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Volume 5, Nomor 1, Juni, 2019.
- Sjafrina, Almas Ghaliya Putri, “Dampak Politik Uang terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik”, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Volume 5, Nomor 1, Juni, 2019.
- Sukmajati, Mada, “Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia”, *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, Volume 37, Nomor 3, 2018.
- Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober, 2015.

Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), “Struktur RUU KUHP”, disampaikan pada *Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 14 Juni 2021.

_____ , “Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP”, disampaikan pada *Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 14 Juni 2021.

Wibisana, Andri Gunawan, “Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2, Juni, 2019.

Wicaksono, Dian Agung, dan Garuda Era Ruhpinesthi, “Inisiasi Penerapan *Purcell Principle* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 22, Nomor 1, Maret, 2025.

Williams, Robert, “New Concepts for Old?”, *Third World Quarterly*, Volume 20, Nomor 3, Juni, 1999.

E. Disertasi

Bøttkjær, Louise Thorn, “Votes for Sale: Essays on Clientelism in New Democracies”, *Doctoral Thesis*, Doctoral School of Organisation and Management Studies Copenhagen Business School, Frederiksberg, 2019.

Junaidi, Mohamad Hakim, “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Orr, Graeme David, “Dealing in Votes: Electoral Bribery and its Regulation in Australia”, *Thesis (PhD Doctorate)*, Doctor of Philosophy Program Griffith Law School Griffith University, Brisbane, 2005.

Santoso, Topo, “Settlement of Election Offences in Four Southeast Asian Countries (with Special References to the Indonesian General Election)”, *Thesis (PhD Doctorate)*, Doctor of Philosophy Program Faculty of Law University of Malaya, 2009.

F. Dokumen Lain

Criminal Code of the Republic of Lithuania (No. VIII-1968).

Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance (Cap. 554).

Independent Commission against Corruption Ordinance (Cap. 204).

Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 9 Maret 2021.

Law on the Special Investigations Service (No. VIII-1649).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2015.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Tahun 2020.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 28 Mei 2018.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 25 Juni 2019.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum versi 14 Juli 2020.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum versi 26 November 2020.

United Nations Convention against Corruption, 2003.

G. Internet

Farisa, Fitria Chusna, “KPU: Politik Uang Cikal Bakal Korupsi”, *nasional.kompas.com/read/2019/04/08/21252301/kpu-politik-uang-cikal-bakal-korupsi*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

Hafil, Muhammad, “KPK Banyak Terima Laporan Politik Uang”, *news.republika.co.id/berita/pp0kcs430/kpk-banyak-terima-laporan-politik-uang*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “TPK Jenis Perkara”, *kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

_____ , “TPK Profesi/Jabatan”,
kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2, diakses pada tanggal 30
Juni 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Waspada Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi”, *aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “10 Undang-Undang yang Sering Diuji”, *mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

Shidarta, “Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum”, *business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

Yuntho, Emerson, “Korupsi Massal Wakil Rakyat Daerah”, *kompas.id/baca/artikel-opini/2018/09/19/korupsi-massal-wakil-rakyat-daerah*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025.